

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Arifin Hoesein, Zainal, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Asshiddiqe, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. Kedua, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008
- C, Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, Malang: Intrans Publishing, 2011.
- Dewa Gede Palguna, I, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Aburaera, Sukarno, et. al, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Cet. Ke -1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Farida Indarti S, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius: yogayakarta, 2007.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Keenam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan keenam, Nusa Media: Bandung, 2011.

- Kusnardi, Moh dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cet. ketujuh, Gaya Media Pratama: Jakarta, 2008.
- MacIver, R.M, *Modern State*, Oxford University Press: London, 1926.
- Mahfudz MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ketiga, Rajawali Pers Persada: Jakarta, 2012.
- _____, Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Cet. Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konpress, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Sekretariat Negara, *Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Cet. Pertama: edisi ke III, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1995.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Pertama, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan ketujuh, Liberty: Yogyakarta, 2005.
- Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Cet. Ketiga, Bandung: Nusa Media, 2011.

- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, Prenada Media: Jakarta, 2003.
- Thalib, Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN: 1940.
- Van Apeldoorn, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ketigapuluh, Pradnya Paramita: Jakarta, 2009.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

2. Makalah

- Syahuri, Taufiqurroham, *Kewenangan KPU Pasca Putusan MK No.87/PUU-XI/2013*, Disampaikan pada Keterangan Ahli Secara Tertulis Pada Sidang Mahkamah Konstitusi Tanggal 8 Januari 2014, Perkara Nomor 118/PUU-XII/2014.

3. Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1949*.
- _____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950*.

- _____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan*, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.
- _____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*, TAP MPR No. III Tahun 2000.
- _____, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No.5076.
- _____, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik*, UU No.10 Tahun 2004, LN No.53 Tahun 2004, TLN No.4389.
- _____, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234.
- _____, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22 Tahun 1999, LN No.60 Tahun 1999, TLN No.3839.
- _____, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.32 Tahun 2004, LN No.125 Tahun 2004, TLN No.4437
- _____, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*, UU No.22 Tahun 2014, LN No.243 Tahun 2014, TLN No.5586.
- _____, *Undang-Undang Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri*, UU No.22 Tahun 1948.

- _____, *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, UU No.22 Tahun 2007, LN No.59 Tahun 2007, TLN No.4721.
- _____, *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, UU No. 15 Tahun 2011, LN No.101 Tahun 2011, TLN No.5246.
- _____, *Undang-Undang Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, UU No. 1 Tahun 1945*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.12 Tahun 2008, LN No.59 Tahun 2008, TLN No.4844.
- _____, *Undang – Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No.18 Tahun 1965*.
- _____, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* , UU No. 1 Tahun 1957.
- _____, *Undang – Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, UU No. 5 Tahun 1974.
- _____, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Perpu Nomor 1 Tahun 2014, LN No.245 Tahun 2014, TLN No.5588.
- _____, *Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum*, Kepres Nomor 16 Tahun 1999.

- _____, *Penetapan Presiden Tentang Pemerintah Daerah*, Penpres Nomor 6 Tanggal 7 September Tahun 1959.

4. Putusan Pengadilan

- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004.
- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013